

## RINGKASAN

**TASYA AZRINA**  
**NIM: 180510323**

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Sirup Yang Mengandung *Etilen Glikol* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

**(Dr. Manfarisyah, S.H., M.H. dan Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum.)**

Perkembangan bidang kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan dianggap sebagai hak fundamental setiap individu, yang harus dijamin oleh negara. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diperlukan tindakan hukum yang tegas untuk melindungi konsumen dari dampak negatif penggunaan obat yang berpotensi membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat sirup yang mengandung etilen glikol.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat sirup yang mengandung *etilen glikol* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu diwujudkan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan, pengujian laboratorium yang akurat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun bentuk perlindungannya adalah pelaku usaha berkewajiban untuk berhati-hati terhadap produknya. Kelalaian pelaku usaha dalam memproduksi barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Upaya penyelesaian sengketa konsumen akibat dirugikan atas peredaran obat sirup yang mengandung *etilen glikol* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Adapun penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui jalur litigasi merujuk pada ketentuan peradilan umum sesuai Pasal 45 UUPK. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui non litigasi dapat ditangani oleh BPSK dengan cara mediasi atau konsolidasi atau arbitrase.

Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan kepada pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati akan kandungan produknya dan mengutamakan mutu serta keamanan produk dengan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam produksi sediaan farmasi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Sirup, *Etilen Glikol*.

## SUMMARY

**TASYA AZRINA**  
**NIM: 180510323**

*Legal Protection To Consumers Over The Distribution Of Medicine Syrup Containing Ethylene Glycol Is Reviewed From Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection*

**(Dr. Manfarisyah, S.H., M.H. and Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum)**

*Development of the health sector in increasing awareness, will and ability to live healthily for every individual, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Health is considered a fundamental right of every individual, which must be guaranteed by the state. In relation to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, strict legal action is needed to protect consumers from the negative impacts of using drugs that have the potential to endanger health. Therefore, this research will further discuss legal protection for consumers regarding the distribution of syrup drugs containing ethylene glycol.*

*This research uses normative juridical research or literature law research. This research uses a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach).*

*Based on the research results, it is known that the form of legal protection for consumers regarding the distribution of syrup drugs containing ethylene glycol based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is realized through the Food and Drug Supervisory Agency by carrying out strict supervision of the production, distribution and sale of drugs. -medicine, accurate laboratory testing, and strict law enforcement against business actors who violate these provisions. The form of protection is that business actors are obliged to be careful with their products. Negligence by business actors in producing goods is the responsibility of business actors. Efforts to resolve consumer disputes resulting from losses due to the distribution of syrup containing ethylene glycol can be done in two ways, namely through litigation and non-litigation. As for resolving disputes against consumers through litigation, it refers to general court provisions in accordance with Article 45 UUPK. Meanwhile, resolving consumer disputes through non-litigation can be handled by BPSK by means of mediation or consolidation or arbitration.*

*The advice that can be given is that it is hoped that business actors will be more careful about the contents of their products and prioritize product quality and safety by not using dangerous ingredients in the production of pharmaceutical preparations.*

*Keywords: Consumer Protection, Syrup, Ethylene Glycol.*